

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Para ahli ekonomi mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur corak kegiatan ekonomi. Sedangkan istilah pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara (Sukirno 2006).

#### 1. Teori Utama Pembangunan Ekonomi

##### 1.1. Model Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Alasan mengapa Harrod dan Domar menetapkan investasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi adalah karena investasi memiliki sifat ganda sebagai berikut (Jhingan, 1990) : *Pertama*, ia menciptakan pendapatan, dan *kedua*, ia memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Bila kita asumsikan bahwa ada hubungan ekonomi langsung antara besarnya stok modal secara keseluruhan, atau  $K$ , dengan GDP, atau  $Y$ . Maka hal itu berarti bahwa setiap tambahan neto terhadap stok modal dalam bentuk investasi baru akan

menghasilkan kenaikan arus *output* nasional atau GNP (P. Todaro, 2000).

Hubungan tersebut dikenal dengan rasio modal-*output*.

Melalui penetapan  $k$  sebagai rasio modal *output*,  $s$  sebagai rasio tabungan nasional yang menjadi bagian dari *output* nasional, dan bahwa jumlah investasi ( $I$ ) baru yang besarnya ditentukan oleh jumlah tabungan total ( $S$ ). Maka dapat disusun model pertumbuhan ekonomi sebagai berikut (P. Todaro, 2000) :

- 1) Tabungan ( $S$ ) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau  $s$ , dari pendapatan nasional ( $Y$ ). Oleh karena itu, kita pun dapat menuliskan hubungan tersebut dalam bentuk persamaan yang sederhana :

$$S = sY \dots\dots\dots (2.1)$$

- 2) Investasi ( $I$ ) didefinisikan sebagai perubahan dari stok modal ( $K$ ) yang dapat diwakili oleh  $\Delta K$ , sehingga kita dapat menuliskan persamaan sederhana kedua sebagai berikut :

$$I = \Delta K \dots\dots\dots (2.2)$$

Akan tetapi, karena jumlah stok modal  $K$  mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau *output*  $Y$ , seperti telah ditunjukkan oleh rasio modal-*output*,  $k$ , maka :

$$\frac{K}{Y} = k \text{ atau } \frac{\Delta K}{\Delta Y} = k \dots\dots\dots (2.3)$$

atau, akhirnya

$$\Delta K = k \cdot \Delta Y \dots\dots\dots (2.4)$$

- 3) Terakhir, mengingat jumlah keseluruhan dari tabungan nasional ( $S$ ) harus sama dengan keseluruhan investasi ( $I$ ), maka persamaan berikutnya dapat ditulis sebagai berikut :

$$S = I \dots\dots\dots (2.5)$$

Jadi, jika persamaan-persamaan di atas diringkas akan menjadi :

$$S = I \dots\dots\dots (2.6)$$

$$s \cdot Y = k \cdot \Delta Y \dots\dots\dots (2.7)$$

$$\frac{s}{k} = \frac{\Delta Y}{Y} \dots\dots\dots (2.8)$$

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya GNP ( $\Delta Y/Y$ ) ditentukan oleh rasio tabungan nasional ( $s$ ) dan rasio modal-*output* nasional ( $k$ ) secara bersamaan.

Apabila lingkungannya adalah suatu region atau daerah, maka GNP digantikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang besarnya ditentukan oleh rasio tabungan daerah ( $s$ ) dan rasio modal-*output* daerah ( $k$ ) secara bersamaan.

## 1.2. Model Pertumbuhan Neo-klasik (Robert Solow)

Liberalisasi pasar-pasar nasional akan merangsang investasi, baik itu investasi domestik maupun luar negeri, sehingga dengan sendirinya akan memacu tingkat akumulasi modal. Bila diukur berdasarkan satuan tingkat pertumbuhan GNP, hal tersebut sama dengan penambahan tingkat tabungan domestik, yang pada gilirannya akan meningkatkan rasio modal-tenaga kerja (*capital-labor ratios*) dan pendapatan per kapita negara-negara berkembang yang pada umumnya miskin modal. Dalam bentuknya yang lebih formal, model pertumbuhan neo-klasik Solow memakai fungsi agregat standar (P. Todaro dan Stephen C. Smith, 2003) :

$$Y = K\alpha (AL)^{1-\alpha} \dots\dots\dots (2.9)$$

Dimana :

$Y$  = Produk Domestik Bruto;

$K$  = stok modal fisik dan modal manusia;

$L$  = adalah tenaga kerja

$A$  = produktivitas tenaga kerja;

$\alpha$  = elastisitas output terhadap modal (persentase kenaikan GDP yang

bersumber dari 1 persen penambahan modal fisik dan modal manusia)

Menurut teori pertumbuhan neo-klasik tradisional (*traditional neoclassical growth theory*), pertumbuhan *output* selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor : kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi), serta penyempurnaan teknologi (P. Todaro dan Stephen C. Smith, 2003). Suatu negara atau wilayah yang mengadakan hubungan perdagangan dan kerjasama investasi dengan negara-negara lain pasti akan mengalami konvergensi dan peningkatan pendapatan per kapita karena arus modal akan masuk dari negara atau wilayah yang kaya ke negara atau wilayah yang miskin.

## **B. Definisi Ketenagakerjaan**

Secara umum tenaga kerja (*manpower*) atau penduduk usia kerja (UK) diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun keatas) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Menurut Dumairy tenaga kerja adalah penduduk yang berumur

pada batas usia kerja, dimana batas usia kerja setiap negara berbeda-beda (Dumairy, 1996).

Hal serupa juga dinyatakan Simanjuntak (2001) yang menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga dengan batasan umur 15 tahun. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Sitanggang dan Nachrowi (2004) yang menyatakan bahwa tenaga kerja adalah sebagian dari keseluruhan penduduk yang secara potensial dapat menghasilkan barang dan jasa.

Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang memiliki tunjangan di hari tua yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta. Untuk golongan inipun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu mereka yang telah mencapai usaha pensiun biasanya tetap masih harus bekerja sehingga mereka tetap digolongkan sebagai tenaga kerja (Payaman Simanjuntak, 2001).

Pada statistik Indonesia sejak tahun 1971 batas usia kerja adalah seseorang yang sudah berumur 10 tahun atau lebih, namun sesuai dengan Konversi ILO (*International Labor Organization*) semenjak dilaksanakan Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) tahun 2001 batas usia kerja yang semula 10 tahun atau lebih dirubah menjadi 15 tahun atau lebih. Konsep tersebut membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja.

Angkatan kerja (*labor force*) adalah penduduk yang belum bekerja namun siap untuk berkerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku (Suparmoko, 2002). Dalam hal ini adalah penduduk yang kegiatan utamanya selama seminggu yang lalu bekerja (K), atau sedang mencari pekerjaan (MP). Untuk kategori bekerja apabila minimum bekerja selama 1 jam selama seminggu yang lalu untuk kegiatan produktif sebelum pencacahan dilakukan. Sedangkan mencari pekerjaan adalah seseorang yang kegiatan utamanya sedang mencari pekerjaan, atau sementara sedang mencari pekerjaan dan belum bekerja minimal 1 jam selama seminggu yang lalu.

Jadi angkatan kerja dapat diformulasikan melalui persamaan identitas sebagai berikut:  $AK = K + MP$ . Penjumlahan angka-angka angkatan kerja dalam bahasa ekonomi disebut sebagai penawaran angkatan kerja (*labour supply*). Sedangkan penduduk yang berstatus sebagai pekerja atau tenaga kerja termasuk ke dalam sisi permintaan (*labour demand*).

Bukan Angkatan Kerja (*unlabour force*), adalah penduduk yang berusia kerja (15 tahun ke atas) yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang mencari kerja, yaitu : orang-orang yang kegiatannya sekolah (pelajar,mahasiswa), mengurus rumah tangga serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiunan,penderita cacat yang independen).

Jadi jumlah usia kerja (UK) apabila dilihat melalui persamaan identitas adalah sebagai berikut:

$$UK = AK + BAK$$

Tingkat pengangguran (*unemployment rate*), adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja sedang aktif mencari pekerjaan, yaitu membandingkan jumlah orang yang mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran (TP) dapat dirumuskan sebagai berikut:  
$$TP = MP / AK \times 100\%$$

Tingkat Pengangguran Alamiah (*natural rate of unemployment*) adalah keadaan yang menunjukkan adanya tingkat pengangguran rata-rata yang berfluktuasi. Tingkat Pengangguran alamiah bisa dipandang sebagai tingkat pengangguran yang mempengaruhi gravitasi perekonomian dalam jangka panjang, dengan adanya ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja yang menyulitkan pekerja dari proses perolehan pekerjaan dengan segera.

Kesempatan kerja secara umum diartikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut secara aktif dalam kegiatan perekonomian.

Kesempatan kerja menurut BPS adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja atau disebut pula pekerja. Bekerja yang dimaksud disini adalah paling sedikit satu jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu

Berikut beberapa definisi lain mengenai kesempatan kerja:

Esmara (1986), kesempatan kerja dapat diartikan sebagai jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah memperoleh pekerjaan, semakin banyak orang yang bekerja semakin luas kesempatan kerja.

Sagir (2000), memberi pengertian kesempatan kerja sebagai lapangan usaha atau kesempatan kerja yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi, dengan demikian kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai partisipasi dalam pembangunan.

### **C. Teori Ketenagakerjaan**

#### **1. Teori Klasik Adam Smith**

Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

#### **2. Teori Klasik J.B. Say**

Jean Baptise Say (1767-1832) mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri (*supply creates its own demand*). Pendapat Say ini disebut Hukum Say (*Say's Law*). Hukum Say didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Tiap ada produksi akan ada pendapatan, yang besarnya sama dengan nilai produksi tadi. Dengan demikian dalam keadaan keseimbangan, produksi cenderung menciptakan permintaannya sendiri akan produksi barang yang bersangkutan.

Berdasarkan asumsi seperti ini ia menganggap bahwa peningkatan produksi akan selalu diiringi oleh peningkatan pendapatan, yang akhirnya akan diiringi pula oleh peningkatan permintaan.

### **3. Teori Keynes**

John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah.

Menurut Keynes, kegiatan perekonomian tergantung pada segi permintaan, yaitu tergantung kepada perbelanjaan atau pengeluaran agregat yang dilakukan perekonomian pada suatu waktu tertentu. Diartikan dengan pengeluaran agregat adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sesuatu perekonomian dalam suatu periode tertentu, dan hanya bisa diukur untuk suatu tahun tertentu.

Semakin besar pembelanjaan agregat (permintaan agregat) yang dilakukan dalam perekonomian, semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang dicapai. Permintaan agregat yang wujudnya tidak selalu mencapai tingkat permintaan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh.

Oleh sebab itu, pengangguran akan selalu berlaku. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu memengaruhi permintaan agregat.

Dalam hal ini, diasumsikan bahwa terdapat hubungan antara output nasional dan kesempatan kerja nasional. Apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan

maka kesempatan kerja mengalami kenaikan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka kesempatan kerja pun akan mengalami penurunan.

Pandangan *mainstream economy* terhadap permintaan tenaga kerja adalah sebagaimana permintaan terhadap faktor produksinya, dianggap sebagai permintaan turunan (*derived demand*), yaitu penurunan dari fungsi perusahaan. Meskipun fungsi perusahaan cukup bervariasi, meliputi memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan penjualan atau perilaku untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, namun maksimisasi keuntungan sering dijadikan dasar analisis dalam menentukan penggunaan tenaga kerja.

Mempertimbangkan hal tersebut (maksimisasi keuntungan), dan dengan asumsi perusaha beroperasi dalam sistem pasar persaingan, maka perusahaan cenderung untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat upah sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja (*ValueMarginal Product of Labor, VMPL*). VMPL menunjukkan tingkat upah maksimum yang mau dibayarkan oleh perusahaan agar keuntungan perusahaan maksimum.

#### **4. Teori Harrod-Domar**

Teori Harrod-domar (1946) dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas yang membesar tidak diikuti dengan permintaan yang besar, surplus akan muncul dan disusul penurunan jumlah produksi.

#### **D. Keseimbangan Tenaga Kerja**

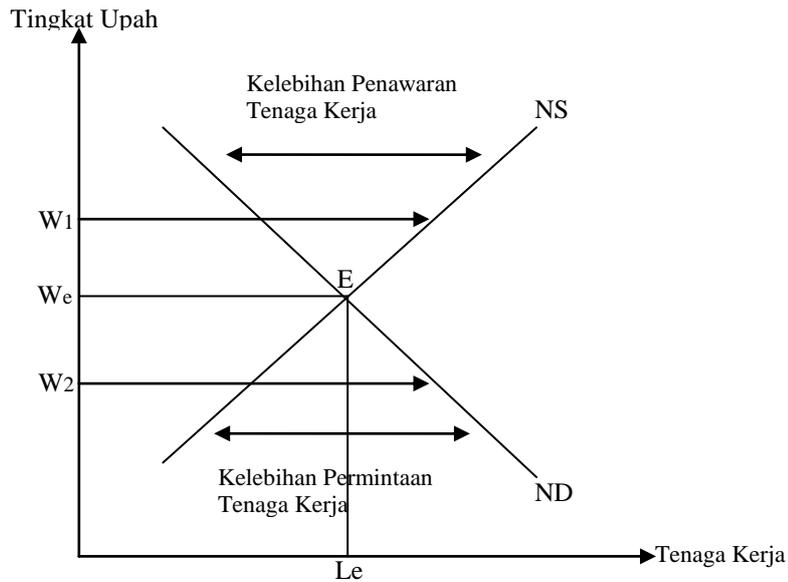
Penentuan jumlah pekerja yang akan digunakan dalam kegiatan ekonomi diperlukan analisis mengenai pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja tercipta karena adanya proses penempatan atau hubungan kerja yang meliputi permintaan dan penyediaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja menjelaskan berapa banyak perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan tingkat upah pada periode tertentu. Permintaan tenaga kerja ini bertujuan untuk membantu proses produksi. Jadi besarnya permintaan tenaga kerja tergantung dari output yang dihasilkan. Permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (Simanjuntak, 2001).

Penawaran tenaga kerja tergantung dari jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang memilih masuk angkatan kerja, jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja dan upah pasar. Bagi pekerja upah adalah salah satu alat untuk meningkatkan daya beli dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, bagi perusahaan upah mempengaruhi biaya produksi dan tingkat harga yang pada akhirnya berakibat pada pertumbuhan produksi, perluasan pasar, dan kesempatan kerja.

Teori ekonomi Neoklasik menjelaskan sifat penyediaan atau penawaran tenaga kerja dalam perekonomian yaitu :

- a. Penawaran terhadap tenaga kerja akan bertambah bila tingkat upah meningkat.
- b. Permintaan terhadap tenaga kerja akan berkurang bila tingkat upah meningkat. Ini dilukiskan dengan garis

Berdasarkan asumsi bahwa semua pihak mempunyai informasi yang lengkap mengenai pasar kerja, maka teori neoklasik beranggapan bahwa jumlah penyediaan tenaga kerja selalu sama dengan permintaan.



**Gambar 4. Keseimbangan Tenaga Kerja.**

Gambar 4 kurva ND menggambarkan permintaan tenaga kerja dalam perekonomian dan kurva NS menggambarkan penawaran tenaga kerja dalam perekonomian.

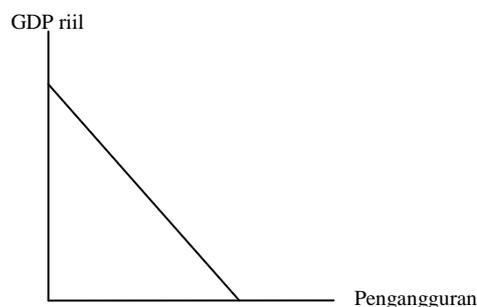
Keseimbangan di pasar tenaga kerja tercapai ketika permintaan tenaga kerja di pasar adalah sama dengan penawarannya. Keadaan tersebut dinamakan titik ekuilibrium (titik E). Titik E tersebut menentukan besarnya penempatan atau jumlah orang yang bekerja ( $L$ ) dan tingkat upah ( $W$ ). Jika terjadi

ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja maka akan timbul masalah dalam pasar tenaga kerja.

Keseimbangan yang tercapai dapat terlihat jelas apabila kita membandingkannya dengan keadaan yang berlaku pada tingkat upah yang lain misal pada  $W_1$  atau  $W_2$ . Apabila tingkat upah adalah  $W_1$  akan berlaku kelebihan penawaran kerja (berarti sebagian tenaga kerja menganggur). Apabila tingkat upah adalah  $W_2$  akan berlaku kelebihan permintaan tenaga kerja. Keadaanya menyebabkan kenaikan upah, yang seterusnya menyebabkan penawaran tenaga kerja bertambah dan permintaan tenaga kerja berkurang.

#### E. Teori Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mankiw (2000), Okun seorang ahli ekonomi, memperkenalkan Hukum Okun dan menyatakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara tingkat pengangguran dengan GDP (Gross Domestic Product) riil, di mana terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dengan GDP riil. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kesempatan kerja dengan GDP riil.



Sumber : Mankiw 2000.

**Gambar 5. Kurva Hukum Okun.**

Kurva Hukum Okun pada Gambar 5 menjelaskan hubungan negatif (bila satu naik, yang lain turun) antara pengangguran dan GDP riil. Secara ringkas, ini didefinisikan sebagai :

$$\text{Persentase } \Delta \text{ GDP Riil} = 3,5\% - (2 \times \Delta \text{ Tingkat Pengangguran})$$

Jika tingkat pengangguran tetap sama, GDP riil tumbuh sekitar 3,5 persen. Untuk setiap poin persentase tingkat pengangguran meningkat, pertumbuhan GDP riil biasanya turun sekitar 2 persen.

Sementara itu dalam Todaro 2000, dijelaskan bahwa dalam teori pertumbuhan Harrod-Domar dinyatakan bahwa secara definitif tingkat pertumbuhan output (Y) dikurangi dengan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja (Y/L) kurang lebih sama dengan pertumbuhan kesempatan kerja (L). Secara matematis hubungan-hubungan tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

$$\frac{\Delta Y}{Y} - \frac{\Delta(Y/L)}{Y/L} = \frac{\Delta L}{L}$$

Todaro menggunakan teori Harrod-Domar, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan lebih mengutamakan perkembangan sektor-sektor ekonomi yang padat karya seperti sektor pertanian dan industri-industri berskala kecil. Apabila pertumbuhan ekonomi dilihat dari pertambahan output dalam bentuk GDP konstan, maka akan menghilangkan unsur inflasi di dalamnya.

Sementara itu di sisi lain inflasi ini sebenarnya dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan dapat menciptakan kesempatan kerja. Secara umum pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB), hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang ditentukan oleh perubahan PDRB dengan tahun dasar tertentu secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan kesempatan kerja.

## **F. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Perkembangan pembangunan ekonomi secara makro dapat digambarkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian dalam suatu wilayah.

PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun).

Dalam hal ini PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi. PDRB juga merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas ekonomi suatu daerah atau sebagai nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah.

PDRB digunakan untuk berbagai tujuan, tetapi yang terpenting adalah sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian (Mankiw,2007).

### **1. Metode Perhitungan PDRB**

#### **1.1. Pendekatan Produksi**

Pendekatan dengan cara ini dimaksudkan untuk menghitung netto barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh sektor ekonomi selama setahun disemua wilayah.

Barang dan jasa yang di produksi ini dimulai dari harga produsen yaitu harga yang belum termasuk biaya transport dan pemasaran karena biaya transport akan

dihitung sebagai pendapatan sektor transport, sedang biaya pemasaran akan dihitung sebagai pendapatan sektor perdagangan.

Nilai barang dan jasa pada harga produsen ini merupakan nilai produksi bruto (NPB), sebab masih termasuk didalamnya biaya-biaya barang dan jasa-jasa yang dipakai dan dibeli dari sektor lain. Untuk menghindari perhitungan dua kali (*double account*), maka biaya-biaya barang dan jasa-jasa harus dikeluarkan sehingga diperoleh nilai produksi netto atau disebut juga nilai tambah bruto (termasuk penyusutan dan pajak tidak langsung).

### **1.2. Pendekatan Pendapatan**

PDRB dirumuskan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor produksi (berupa gaji dan upah, bunga, sewa dan laba) yang ikut serta dalam proses produksi suatu wilayah/region dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, berdasarkan pengertian diatas, maka NTB adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, anak keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

### **1.3. Pendekatan Pengeluaran**

PDRB dihitung jumlah seluruh komponen pengeluaran akhir, meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan swasta yang tidak mencari keuntungan, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto serta ekspor netto (yaitu ekspor dikurangi impor) didalam suatu wilayah/region dengan jangka tertentu/setahun. Dengan metode ini, penghitungan NTB bertitik tolak pada penggunaan akhir dan barang dan jasa yang diproduksi.

## **2. PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan**

Pendapatan regional suatu propinsi dapat dipakai untuk mengukur kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Kenaikan itu dapat disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

- a. Kenaikan pendapatan yang benar-benar dapat menaikkan daya beli penduduk (kenaikan riil).
- b. Kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh karena inflasi, kenaikan pendapatan yang disertai kenaikan harga pasar tidak menaikkan daya beli penduduk dan kenaikan semacam ini merupakan kenaikan pendapatan yang semu (tidak riil).

Oleh karena itu berdasarkan kenyataan diatas, untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riil) maka faktor inflasi harus dieliminir.

Pendapatan regional dengan faktor inflasi (faktor inflasi belum dihilangkan) merupakan pendapatan regional dengan harga yang berlaku. Sedangkan pendapatan regional dimana faktor inflasi tidak lagi diperhitungkan disebut dengan pendapatan regional atas harga konstan.

## **G. Investasi**

Investasi merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Ketika pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi tersebut diperkirakan akan mendatangkan keuntungan berupa hasil penjualan yang lebih besar dari pengeluaran yang untuk

investasi, maka investor akan memutuskan untuk melakukan investasi atau penanaman modal (Sukirno, 2005).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain adalah untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada tiga bentuk pengeluaran investasi, yakni :

- a. Investasi Tetap Bisnis (*Business Fixed Investment*) mencakup peralatan dan struktur yang perusahaan beli untuk proses produksi.
- b. Investasi Residensial (*Residential Investment*) mencakup perumahan baru yang orang beli untuk ditinggali dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan.

- c. Investasi Persediaan (*Inventory Investment*) mencakup barang-barang yang perusahaan tempatkan di gudang termasuk bahan-bahan dan perlengkapan, barang setengah jadi dan barang jadi (Mankiw, 2000).

Menurut definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), pembentukan modal tetap adalah pengeluaran untuk pengadaan, pembuatan, atau pembelian barang-barang modal baru (bukan barang-barang konsumsi) baik dari dalam negeri maupun impor, termasuk barang modal bekas dari luar negeri. Pembentukan modal tetap yang dicakup hanyalah yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi di dalam negeri (domestik).

Berdasarkan dari sumber kepemilikan modal, maka investasi dapat dibagi menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN).

### **1. Penanaman Modal Asing (PMA)**

PMA adalah penanaman modal asing yang dilakukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dan menanggung segala resiko penanaman modal tersebut secara langsung. Modal asing itu sendiri adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak berasal dari kekayaan devisa Indonesia.

Dalam Salvatore (1997), dijelaskan bahwa PMA terdiri atas:

- a. Investasi portofolio (*portfolio investment*), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya

berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.

- b. Investasi asing langsung (*foreign direct investment*), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya.

## **2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

PMDN adalah penggunaan modal dalam negeri baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha. Modal dalam negeri adalah modal yang berasal dari kekayaan masyarakat Indonesia baik yang dimiliki oleh negara, swasta nasional, atau swasta asing.

Upaya dalam mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam satu tahun tertentu yang digolongkan sebagai investasi dalam negeri, meliputi pengeluaran atau pembelanjaan untuk:

- a. Seluruh nilai pembelian para pengusaha dalam negeri atas barang modal dan membelanjakan untuk mendirikan industri-industri.
- b. Pengeluaran masyarakat untuk mendirikan tempat tinggal.
- c. Pertambahan dalam nilai stok barang-barang perusahaan yang sumber pengadaannya berasal dari modal domestik berupa bahan mentah, barang yang belum diproses dan barang jadi.

## **H. Upah Minimum Provinsi**

Upah Minimum Provinsi adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.

Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam propinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).

Pemerintah Indonesia berusaha untuk menetapkan upah minimum yang sesuai dengan standar kelayakan hidup melalui suatu kebijakan pengupahan. Upah minimum yang ditetapkan pada masa lalu didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum, dan selanjutnya didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). KHM ini adalah 20 persen lebih tinggi dalam hitungan rupiah jika dibandingkan dengan Kebutuhan Fisik Minimum.

Peraturan UU No. 13/2003, menyatakan bahwa upah minimum harus didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak, akan tetapi perundangan ini belum sepenuhnya diterapkan, sehingga penetapan upah minimum tetap didasarkan pada KHM.

Menurut Sulistiawati (2012), Kelayakan suatu standar upah minimum didasarkan pada kebutuhan para pekerja sesuai dengan kriteria di bawah ini:

- a. Kebutuhan hidup minimum (KHM).
- b. Index Harga Konsumen (IHK).
- c. Kemampuan perusahaan, pertumbuhannya dan kelangsungannya.
- d. Standar upah minimum di daerah sekitar.
- e. Kondisi pasar kerja.
- f. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Munculnya ketentuan upah minimum akan mendorong terjadinya distorsi dalam pasar tenaga kerja. Artinya dengan ketentuan upah minimum, maka buruh mempunyai kekuatan monopoli yang cenderung melindungi buruh yang telah bekerja dalam industri itu. Kekuatan serikat buruh yang cenderung memaksimalkan pendapatan dari buruh yang ada akan mendiskriminasi pendatang baru dalam pasar tenaga kerja. Pandangan serupa valid dalam kondisi di mana perusahaan tidak mempunyai kekuatan monopsoni untuk menekan buruh. Model lain yang sejalan dengan model neoklasik adalah model *dual economy* yang mengasumsikan perekonomian (pasar tenaga kerja) tersegmentasi menjadi sektor formal dan sektor informal. Penetapan upah minimum akan mengurangi permintaan tenaga kerja di sektor formal atau dalam model yang dinamis, minimal akan mengurangi tingkat penciptaan lapangan kerja (Ikhsan, 2010).

Teori upah efisiensi (*efficiency-wage*) merupakan teori yang menghubungkan antara produktivitas atau efisiensi pekerja dengan upah yang mereka terima. Teori ini menyatakan bahwa upah tinggi membuat pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan menurunkan tagihan upah perusahaan, itu akan juga menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Teori upah efisiensi pertama menyatakan upah mempengaruhi kesehatan. Teori upah efisiensi kedua menyatakan upah tinggi mengurangi perputaran tenaga kerja. Teori upah efisiensi ketiga menyatakan kualitas rata-rata tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang dibayar ke karyawannya. Teori upah efisiensi keempat menyatakan upah tinggi memperbaiki upaya pekerja (Mankiw, 2007).

## **I. Penelitian Terdahulu**

- a. Penelitian Elnopembri (2007), dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil Di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 1990-2004. Metode analisis yang digunakan adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS) dalam bentuk *semi-log*. Variabel yang digunakan berupa variabel terikat jumlah tenaga kerja industri kecil, dan variabel bebas Upah Minimum Regional (UMR), tingkat suku bunga investasi kredit Bank Pemerintah Daerah, tingkat suku bunga kredit investasi bank persero pemerintah di daerah, dan nilai produksi industri kecil di kabupaten Tanah Datar. Data yang digunakan adalah data sekunder runtut waktu (*time series*) dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2004.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa upah minimum regional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil. Tingkat suku bunga kredit investasi Bank Pemerintah Daerah dan Bank Persero Pemerintah di daerah sama-sama memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil artinya peningkatan suku bunga kredit hanya akan mengakibatkan turunnya permintaan tenaga kerja industri kecil. Nilai produksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil. Ekspansi yang dilakukan industri kecil dengan menciptakan akses pasar akan mendorong peningkatan produksi sehingga berdampak terciptanya lapangan kerja baru.

- b. Penelitian Wicaksono (2009), dengan judul Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku Bunga Riil, dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga kerja Pada Industri Pengolahan Sedang Dan Besar Di Indonesia Tahun 1990-2008. Metode Penelitian ini adalah metode *Ordinary Least Square (OLS)* dalam bentuk *semi-log*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa variabel terikat jumlah tenaga kerja yang bekerja industri pengolahan dan variabel bebas PDB industri pengolahan, suku bunga riil, upah riil, dan jumlah unit usaha. Data dengan runtun waktu tahun 1990-2008.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDB industri dan upah riil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga

kerja industri pengolahan. Variabel suku bunga riil dan jumlah unit usaha tidak mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri pengolahan.

- c. Penelitian Nainggolan (2009), dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah Metode *Generalized Least Square (GLS)* dengan *Random Effek Model (REM)*. Variabel yang digunakan berupa variabel bebas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota, Tingkat Bunga Kredit, Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi (UMK) dan variabel terikat kesempatan kerja. Data dengan runtun waktu tahun 2002-2007.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota berpengaruh positif sebesar 76,38 persen dan signifikan, Tingkat Bunga Kredit berpengaruh negatif sebesar 7,29 persen dan tidak signifikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif sebesar 53,06 persen dan signifikan, terhadap kesempatan bekerja pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.

- d. Penelitian Dimas dan Woyanti (2009) dengan judul Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta. Metode analisis yang dipakai adalah metode analisis metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square, OLS*). Variabel yang digunakan berupa variabel bebas upah riil, investasi riil,

dan PDRB. Variabel terikat adalah jumlah tenaga kerja. Dengan kurun waktu tahun 1990-2004.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, tingkat upah dan investasi riil secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Sedangkan secara parsial, PDRB berpengaruh positif dan signifikan, tingkat upah dan investasi riil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta.

- e. Edyan Rachman (2005) dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja di DKI Jakarta. Metode analisis yang dipakai adalah metode analisis metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square OLS). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa variabel terikat yaitu tenaga kerja dan variabel bebas yaitu Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Jumlah Angkatan Kerja di DKI Jakarta. Dengan data runtun waktu tahun 1982-2003.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama PDRB, investasi, UMP, dan angkatan kerja berpengaruh terhadap kesempatan kerja di DKI Jakarta. Secara parsial, investasi berpengaruh negatif, PDRB dan angkatan kerja berpengaruh positif, dan UMP berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja.

**Tabel 5. Penelitian Terdahulu.**

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Elnopembri	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 1990-2004.	Regresi OLS	<p>UMR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil.</p> <p>Tingkat suku bunga kredit investasi Bank Pemerintah Daerah dan Bank Persero Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil.</p> <p>Nilai produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil.</p>
2.	Rezal Wicaksono	Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku Bunga Riil, Dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan	Regresi OLS	<p>Variabel PDB industri dan upah riil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri pengolahan.</p> <p>Variabel suku bunga riil dan jumlah unit usaha tidak mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri pengolahan.</p>

		Sedang Dan Besar Di Indonesia Tahun 1990-2008.		
3.	Indra Oloan Nainggolan	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	GLS dengan <i>Random Effect Model (REM)</i>	PDRB Kabupaten/Kota berpengaruh positif 76,38% dan signifikan. UMK berpengaruh negatif 53,06% dan signifikan. Tingkat Bunga Kredit berpengaruh negatif 7,29% dan tidak signifikan terhadap kesempatan bekerja pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara
4.	Dimas dan Nenek Woyanti	Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta	Regresi OLS	Secara bersama-sama PDRB, upah riil dan investasi riil berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta.  Secara parsial, PDRB berpengaruh positif, upah riil dan investasi riil berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

5	Edyan Rachman	Analisis Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja di DKI Jakarta	Regresi OLS	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama PDRB, investasi, UMP, dan angkatan kerja berpengaruh terhadap kesempatan kerja di DKI Jakarta.</p> <p>Secara parsial, investasi berpengaruh negatif, PDRB dan angkatan kerja berpengaruh positif, dan UMP berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja.</p>
---	------------------	--	----------------	--